GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Suara Pembaruan**	**Tanggal**	**: 15 Februari 2007**
Subyek	**: Pembebesan Lahan DAS**	**Hari**	**: Kamis**
		Halaman	**: 12**

Pembebasan Lahan DAS

Warga Akan Digusur Tanpa Ganti Rugi

[TANGERANG] Sebagai daerah aliran sungai (DAS), bantaran sungai harus dikosongkan sepanjang 50 meter dari sebelah kanan dan 50 meter dari sebelah kiri. Setelah dikosongkan, bantaran sungai itu akan ditanami pohon-pohon besar yang berfungsi sebagai resapan air dan pagar sungai.

Lebar DAS diupayakan akan kembali menjadi sekitar 50 sampai 100 meter dari sungai. Selain mengeruk sungai yang mendangkal, juga bangunan liar di bantaran sungai akan ditertibkan.

Hal itu wajib dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota, guna mengurangi intensitas banjir, yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

"Kami dengan tegas melarang semua bangunan berdiri di sepanjang bantaran Sungai Cisadane. Kebijakan itu, sebagai program jangka panjang. Bantaran sungai harus bersih dan harus dikosongkan dari bangunan," ujar Bupati Tangerang Ismet Iskandar, di Tangerang, Rabu (14/2).

Sebagai langkah pertama, pihaknya akan menggusur ribuan rumah yang berdiri di sepanjang bantaran sungai. "Kita tidak akan memberikan ganti rugi maupun relokasi, karena mereka mendirikan bangunan itu tanpa izin dan melanggar aturan. Kalau mereka tidak mau kita akan paksa," kata Ismet.

Dikatakan pula, tahapan penggusuran akan dimulai dengan pemberitahuan secara baik-baik. "Penggusuran akan dilakukan segera, kita tidak akan menunggu sampai banjir datang lagi tahun depan," tegasnya.

Saat ini, terdapat ribuan bangunan permanen dan semi permanen di sepanjang bantaran Sungai Cisadane, yang berderet dari Karawaci Tangerang hingga Pakuaji Kabupaten Tangerang. Bangunan-bangunan tersebut, ditempati oleh para pendatang dan warga asli setempat sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, sejumlah perumahan mewah juga mengembangkan kawasannya hingga di sekitar bantaran sungai, seperti yang terlihat di kawasan Serpong.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Di bantaran Sungai Cisadane, di wilayah Teluk Naga dan Pakuaji, Kabupaten Tangerang berdiri puluhan perusahaan galangan kapal skala kecil dan besar. Mereka memanfaatkan bantaran sungai untuk membuat kapal pesiar dan memudahkan transportasi pengiriman kapal yang sudah jadi dan bahan baku kapal.

Ismet menyatakan, galangan kapal itu juga akan digusur seperti bangunan-bangunan lainnya. "Saya setuju jika galangan kapal itu ditutup, izinnya pun tidak jelas, lokasinya di Kabupaten Tangerang tapi izinnya di Provinsi Banten," katanya.

Menurut dia, usaha galangan kapal yang dimotori oleh pengusaha dari Jakarta itu, tidak memberikan kontribusi sedikit pun kepada pemerintah daerah. "Malah kita dikasi banjir," katanya.

Di tempat terpisah, Sekda Pemprov DKI Jakarta, Ritola Tasmaya mengatakan, Pemprov DKI juga akan secara tegas menertibkan kawasan DAS. Lebar DAS akan dikembalikan sesuai ketentuan, dan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai akan dipindahkan.

Dia menjelaskan, Pemprov DKI dan pemerintah pusat sudah berkomitmen membangun rumah susun sederhana sewa agar harganya terjangkau bagi masyarakat miskin. Direncanakan, warga yang dipindahkan dari bantaran sungai mencapai 1.000 sampai 2.000 orang setiap tahun.

"Kalau rusun sudah ada dan mereka tidak mau pindah, tak ada cara lain selain bertindak tegas," ujar Ritola.

Dia menambahkan, dengan 71.000 orang yang tinggal di bantaran sungai Jakarta, dibutuhkan waktu sekitar 35 tahun untuk memindahkan mereka ke rusun. Itu sebabnya, dibutuhkan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan rusun twin tower 20 lantai yang hingga kini belum terealisasi.

Normalisasi

Pembebasan lahan DAS merupakan salah satu upaya normalisasi sungai. Selain itu, Pemkab Tangerang juga akan melakukan normalisasi dan pengerukan Sungai Cisadane serta sungai-sungai kecil lainnya di Tangerang, yang tak bisa ditunda lagi.

"Biayanya memang mahal, sekitar Rp 1,6 triliun, dan waktu yang dibutuhkan untuk normalisasi itu sekitar 10 tahun karena harus melakukan perbaikan tanggul dan sebagainya," kata Bupati Ismet Iskandar.

Dikatakan, pengerukan dan normalisasi merupakan keharusan, mengingat banjir yang melanda sebagian wilayah Tangerang beberapa waktu yang lalu adalah karena air Sungai Cisadane meluap. Meluapnya sungai terpanjang dan terbesar di Banten itu, akibat hilangnya wilayah resapan air.

Dia menyebutkan, dana Rp 1,6 triliun tersebut, dibutuhkan untuk membangun tanggul dan jembatan penyeberangan yang rusak akibat banjir, perbaikan pintu air, pengerukan Sungai Cisadane dari hulu hingga hilir, beserta anak-anak sungai, serta program penghijauan dengan menanami bantaran sungai dengan pohon. Selain itu, 33 situ yang kini mengalami pendangkalan karena proses sedimentasi dan terdesak oleh pemukiman, juga akan dikeruk.

Ismet menyatakan, setuju dengan kebijakan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiah dan Gubernur Jawa Barat yang akan menangani banjir secara terpadu. [132/J-9]

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup